

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia terdiri dari beberapa ribu pulau, mulai dari pulau yang terbesar hingga pulau yang terkecil. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar. Berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2010 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia meningkat mencapai angka 237.641.326 jiwa, dengan kenaikan jumlah penduduk Indonesia sebesar 1,49% per tahun. Angka tersebut menempatkan Indonesia pada urutan ke empat dari negara yang berpenduduk paling besar di dunia setelah Republik Rakyat China, India dan Amerika Serikat (Badan Pusat Statistik, 2010).

Masalah-masalah kependudukan di Indonesia perlu ditanggulangi, dikarenakan Jumlah penduduk yang semakin besar dan semakin meningkat ini akan menimbulkan berbagai masalah, seperti kekurangan pangan dan gizi sehingga menyebabkan kesehatan masyarakat yang buruk, pendidikan rendah, kurangnya lapangan pekerjaan, tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi khususnya di negara berkembang.

Tingginya laju pertumbuhan penduduk disebabkan masih tingginya tingkat kelahiran. Pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan hasil-hasil pembangunan kurang bisa dirasakan masyarakat dan menjadi beban berat bagi pembangunan selanjutnya. Oleh karena itu, upaya langsung untuk menurunkan tingkat kelahiran mutlak perlu untuk ditingkatkan.

Upaya mengatasi masalah kependudukan tersebut dilakukan oleh banyak pihak, Dalam hal ini upaya pemerintah dalam rangka mengurangi masalah tersebut adalah menekan jumlah penduduk dengan cara melaksanakan program keluarga berencana (KB). Tujuan dari Keluarga Berencana adalah untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat dengan mengurangi angka kelahiran sehingga pertumbuhan penduduk akan seimbang (Soerjono Soekanto, 2012:338).

Sejak dirintisnya program Keluarga Berencana Nasional di Indonesia pada tahun 1966, banyak hal yang telah dicapai oleh pemerintah khususnya BKKBN beserta seluruh jaringan pendukungnya, sehingga masalah kependudukan di

Indonesia menjadi sedikit berkurang dari sebelumnya. seiring dengan berjalannya waktu dan informasi yang semakin berkembang, jumlah penduduk di Indonesia yang sudah mengetahui tentang program KB mencapai 95%, tetapi yang memiliki kesadaran mengikuti program KB hanya 61%, ada 9% diantaranya memiliki keinginan untuk mengikuti program KB, tetapi tidak jadi mengikuti program KB karena berbagai pertimbangan (BKKBN, 2012).

Alat Kontrasepsi berupa KB adalah upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan, upaya tersebut dapat bersifat sementara, dapat pula bersifat permanen. Penggunaan kontrasepsi merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi fertilitas (Prawirohardjo, 2007). Ada dua metode dalam program KB yaitu Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non Metode Kontrsepsi Jangka Panjang, kategori MKJP antara lain IUD, MOP (Metode Operasi Pria), MOW (Metode Operasi Wanita) dan jenis susuk/implant, sedangkan kategori Non MKJP antara lain kondom, suntik dan pil (Departemen Kesehatan RI, 2008).

Berdasarkan data yang didapat dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan pada tahun 2016, diketahui jumlah peserta KB sebanyak 132.223 orang. dimana pengguna metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) sebanyak 19.587 orang dan pengguna non Metode kontrsepsi jangka panjang adalah sebanyak 112.638 orang. dengan rincian MJKP berupa IUD 4.017, MOP 391, MOW 2.272, dan implant sebanyak 12.907. sedangkan Non MJKP berupa Kondom 1.485, PIL 39.520 dan Suntik sebanyak 71.631 (BP2KB Pamekasan, 2016).

Program KB bukan hanya berlaku pada perempuan saja, melainkan laki-laki juga berkesempatan untuk ber KB, namun pada kenyataannya beberapa penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna alat kontrasepsi adalah perempuan. Hal ini terjadi karena kontruksi masyarakat yang menyatakan bahwa yang harus memakai alat kontrasepsi tersebut adalah perempuan karena perempuanlah yang dapat mengandung dan melahirkan anak. Padahal perempuan lebih sedikit durasi masa suburnya, sedangkan laki-laki setiap harinya dapat mengeluarkan berjuta-juta sperma, sehingga diperoleh adanya logika bahwa yang seharusnya menggunakan alat kontrasepsi adalah laki-laki. Selain itu, karena kontruksi masyarakat tersebut perempuan yang paling banyak terkena efek samping dari

penggunaan alat kontrasepsi seperti kegemukan, vagina kering, pusing dan lain sebagainya (Arum Zakiah, 2015 :3).

Program Keluarga Berencana (KB) mengedepankan hak-hak reproduksi, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender telah disepakati oleh semua Negara pada Konferensi Kependudukan dan Pembangunan ICPD (*International Conference on Population and Development*) di Kairo tahun 1994. Hal ini membawa konsekuensi kepada pelaksanaan program keluarga berencana di Indonesia yang memperhatikan ketiga hal penting tersebut yakni Perempuan mempunyai posisi tawar dan posisi setara dalam pengambilan keputusan KB dan kesehatan reproduksi.

Berkaitan dengan gender, status perempuan dan laki-laki berhubungan juga dengan pengambilan keputusan untuk memilih dan menggunakan alat kontrasepsi. Dalam hal ini adanya sebuah keputusan dalam pemilihan metode kontrasepsi sangat diperlukan oleh seorang perempuan terutama untuk perempuan yang sudah berkeluarga. Pengambilan keputusan bukanlah hal yang mudah untuk diambil, hal itu memerlukan beberapa pemikiran yang panjang dan bahkan memerlukan waktu yang cukup lama untuk menentukan keputusan tersebut.

Bagi seorang perempuan yang sudah berkeluarga, pengambilan keputusan tidak bisa dibuat sendiri. Hal itu perlu adanya persetujuan dari seorang suami dan bahkan persetujuan dari berbagai macam pihak untuk memastikan metode KB yang tepat untuk digunakannya. Pendapat suami mengenai KB cukup kuat pengaruhnya untuk menentukan penggunaan metode KB oleh perempuan.

Masyarakat Madura merupakan masyarakat yang taat hukum dan agama. Agama mengajarkan seorang wanita harus tunduk terhadap suaminya, maka dari itu seorang perempuan (istri) dituntut untuk selalu mentaati dan mematuhi apa yang diperintahkan oleh seorang laki-laki (suami) selama perintah tersebut masih benar menurut islam termasuk juga dalam memutuskan penggunaan KB yang tepat untuk digunakan oleh seorang wanita.

Berdasarkan penjelasan diatas, sangat perlu bagi seorang perempuan untuk mematuhi apa yang diperintahkan oleh seorang laki-laki termasuk dalam hal ini adalah penentuan atau pemilihan KB. Partisipasi laki-laki terhadap KB memang sangatlah kecil, tetapi kontrol mereka (laki-laki) terhadap perempuan dalam memutuskan untuk ber-KB sangat dominan. Ketidakmampuan perempuan memutuskan masalah kesehatan reproduksi dikarenakan oleh kedudukan

perempuan yang lemah dikeluarga dan masyarakat. Ada dominasi budaya patriarki. Bahwa 98% akseptor KB adalah perempuan. Itu berarti perempuan selalu jadi objek dan target sasaran. Perempuan sering tak punya kekuatan memutuskan metode kontrasepsi yang mereka inginkan dan untuk memutuskannya harus dengan keputusan suami (BKKBN Jateng, 2010). Maka dari itu, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh perempuan haruslah mengikuti ketentuan atau keputusan dan persetujuan dari seorang laki-laki (suami), karena dalam hal ini laki-laki mempunyai hak penuh untuk seorang perempuan (istri) dalam menentukan keputusan yang akan diambil nantinya.

Penggunaan metode kontrasepsi KB, memang sangatlah penting untuk menekan jumlah penduduk yang ada di Indonesia khususnya di Madura. Cara yang dilakukan untuk bisa mengendalikan angka kelahiran dalam setiap pasangan adalah salah satunya dengan menggunakan alat KB. Alat KB yang nyaman digunakan sebagai satu cara yang praktis, karena sejauh ini alat KB yang aman dan paling diminati oleh masyarakat adalah KB Suntik. Penggunaan KB Suntik menduduki peringkat pertama atau terbanyak yang digunakan masyarakat Jawa timur sebagai alat kontrasepsi tahun 2015. Alasannya kontrasepsi hormonal ini cenderung lebih diminati oleh masyarakat dikarenakan merasa cocok dan jika dilihat dari penggunaannya kb suntik memberikan efek yang lebih baik dari pada penggunaan KB pil (Listywardani dalam jatim newsroom,2015). Namun untuk metode KB Jangka panjang yang paling aman digunakan dan memiliki keberhasilan 99% adalah Metode Operasi Wanita (MOW) atau bisa disebut Tubektomi. Penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MJKP) berupa Tubektomi ini dinilai tepat untuk digunakan, apabila sebuah keluarga sudah tidak menginginkan untuk memiliki keturunan atau memiliki alasan medis yang lainnya (Wawancara tanggal 21 Desember 2016).

Pulau Madura adalah nama pulau yang terletak disebelah timur laut Jawa yang besarnya kurang dari 5.168 km² (lebih kecil daripada pulau Bali) pulau yang bentuknya seakan mirip dengan badan sapi ini terdiri dari empat kabupaten, yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Madura, pulau dengan sejarahnya yang panjang, tercermin dari budaya dan keseniannya dengan pengaruh islamnya yang kuat. Jumlah penduduk yang semakin padat

menyebabkan kurangnya lapangan pekerjaan dan semakin banyak pengangguran. Dengan adanya program KB yang sudah terealisasi di madura dapat membantu mengurangi masalah tersebut. dimana pencapaian akseptor baru dalam setiap metode kontrasepsi semakin meningkat. Berdasarkan data yang didapat dari Badan pusat statistik provinsi jawa timur pencapaian peserta akseptor baru menurut alat kontrasepsi tahun 2014, jumlah akseptor baru tertinggi untuk metode kontrasepsi tubektomi (MOW) terletak pada kabupaten pamekasan dengan jumlah akseptor baru mencapai 651, Kabupaten Sampang 225, Kabupaten Bangkalan 190 dan Kabupaten Sumenep 20.

Berdasarkan data yang telah didapat dari BP2KB Kabupaten Pamekasan, terdapat 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Pamekasan dan satu kecamatan terbanyak dalam penggunaan KB ditahun terakhir adalah Kecamatan Pamekasan dengan jumlah pengguna sebanyak 11.617 orang. Kecamatan Pamekasan memiliki 18 Desa dan salah satu desa pengguna KB secara umum terbanyak adalah di Desa Bugih dengan Jumlah 1.419 orang. Namun untuk pengguna KB MOW terbanyak di Kecamatan Pamekasan terletak di desa Gladak Anyar dengan jumlah pengguna MOW sebanyak 83 Orang (Data PLKB, Kec.Pamekasan, 2016).

Adanya keyakinan masyarakat akan budaya patriarki dan kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan perempuan untuk penggunaan KB yang menjadikan perempuan dianggap sebagai seorang yang lemah dan tidak memiliki kekuasaan dalam mengambil keputusan. Selain karena hal tersebut penulis juga ingin mengetahui alasan dibalik seorang perempuan memilih dan mengambil keputusan untuk menggunakan KB Tubektomi. Sehingga dengan alasan tersebutlah yang menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian sebagai bahan skripsi yang berjudul “Pengambilan Keputusan Perempuan Dalam Penggunaan Metode Kontrasepsi KB Tubektomi di Kabupaten Pamekasan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang penulis ambil sebagai berikut :

1. Bagaimana pengambilan Keputusan Perempuan Dalam Penggunaan Metode Kontrasepsi KB Tubektomi di Pamekasan ?
2. Bagaimana motif perempuan (istri) dalam menggunakan metode Kontrasepsi KB Tubektomi ?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan penelitian yang penulis harapkan adalah :

1. untuk mengetahui pengambilan Keputusan Perempuan Dalam Penggunaan Metode Kontrasepsi KB Tubektomi dipamekasan
2. untuk mengetahui motif perempuan (istri) dalam memilih menggunakan metode Kontrasepsi KB Tubektomi

1.4 Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pengambilan keputusan yang dilakukan oleh perempuan dalam perspektif gender, dengan mengaplikasikan teori-teori ilmu komunikasi khususnya komunikasi antarpribadi, serta dapat memberikan tambahan ilmiah dan pembenderharaan kepustakaan bagi program studi ilmu komunikasi.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Peneliti

Untuk mengasah dan melatih keterampilan peneliti dalam penulisan karya yang akan dilakukan selanjutnya.

- b. Bagi Masyarakat

Memberikan masukan kepada akseptor KB perempuan dalam proses pengambilan keputusan dalam penggunaan KB khususnya KB Tubektomi. Dan juga untuk memberikan pengetahuan kepada

masyarakat luas akan pentingnya KB untuk menekan jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan.

c. Bagi Pemerintah

Adanya penelitian ini, diharapkan pemerintah dapat membantu masyarakat dalam peningkatan pelaksanaan program KB melalui peningkatan sarana prasarana dalam program KB.